

Judul : HET Minyakita DPR Berpesan, jangan ada penimbunan
Tanggal : Rabu, 06 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

HET Minyakita Bakal Naik

DPR Berpesan, Jangan Ada Penimbunan

ANGGOTA Komisi VI DPR Nasim Khan menyoroti isu kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita dalam waktu dekat. Kenaikan tersebut berisiko memicu lonjakan harga di tingkat konsumen jika tidak dibarengi dengan pengawasan ketat.

Nasim mengungkapkan, saat ini harga Minyakita di berbagai daerah sudah melampaui HET yang ditetapkan sebesar Rp 15.700 per liter. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok per 4 Mei 2026, harga rata-rata nasional telah menyentuh Rp 15.915 per liter. Bahkan, di Pekanbaru, Riau, harga menembus Rp 20.000 dan di Cirebon mencapai Rp 21.000 per liter.

"Ini menunjukkan dengan HET saat ini saja harga di pasaran sudah melampaui batas yang telah ditetapkan," ujar Nasim dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).

Nasim menekankan, stabilitas harga Minyakita adalah tanggung

jawab Pemerintah karena menyangkut ketahanan pangan rumah tangga, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Karena itu, Pemerintah harus menjamin kelancaran distribusi dan menindak tegas oknum yang melakukan penimbunan.

Penimbunan, lanjut dia, hanya akan memperparah kelangkaan yang kini mulai terjadi di beberapa daerah dan mendorong harga semakin melambung tinggi. Jangan sampai ada pihak yang menimbun demi keuntungan pribadi karena praktik ini sangat merugikan masyarakat. "Pemerintah harus hadir melakukan pengawasan lapangan secara langsung," tegas politisi PKB ini.

Nasim mendorong Pemerintah untuk mempertimbangkan skema subsidi atau intervensi khusus agar beban produksi UMKM tidak membengkak yang dapat mematikan usaha mereka. Terlebih, Minyakita sejatinya untuk membantu rakyat kecil mendapatkan harga



Nasim Khan

terjangkau. "Pemerintah perlu hadir melalui subsidi atau kebijakan lain agar masyarakat dan UMKM tetap bisa bertahan di tengah tekanan harga energi dan pangan," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, Pemerintah perlu melakukan penyesuaian agar harga Minyakita tetap sesuai dengan

kondisi pasar saat ini. Terlebih, HET Minyakita tidak mengalami perubahan sejak 2024, sehingga perlu dikaji ulang seiring naiknya biaya produksi.

"Ini faktor karena harga *Crude Palm Oil* (CPO) naik, biaya produksi naik. Jadi kami harus menyesuaikan semua," ujar Budi di Jakarta, Minggu (3/5/2026).

Mendag menegaskan, penyesuaian HET Minyakita tidak ada kaitannya dengan implementasi program biodiesel B50 yang akan dimulai Juli 2026. Rencana penyesuaian harga minyak goreng itu murni karena faktor ekonomi dan operasional. "Faktornya karena harga CPO naik, produksi naik. Kami harus menyesuaikan semua," ucapnya.

B50 merupakan program pencampuran solar dengan minyak nabati berbasis sawit dengan komposisi 50:50. Budi menekankan, Pemerintah akan menyelesaikan kajian ini secara komprehensif agar keputusan

yang diambil nantinya tetap menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri dan daya beli masyarakat.

Saat ini, harga Minyakita terpantau stabil dan cenderung mengalami penurunan di beberapa wilayah. Harga rata-rata Minyakita berkisar Rp 15.800 per liter, sedikit lebih rendah dibandingkan harga sebelumnya yang sempat menyentuh Rp 15.900. "Kondisi ini menunjukkan distribusi berjalan cukup baik," kata dia.

Meski demikian, ia mengakui di beberapa daerah, seperti Papua, harga Minyakita masih sedikit tinggi karena kendala logistik. Untuk mengatasi kendala di wilayah timur, Kemendag telah berkoordinasi dengan Bulog untuk mempercepat distribusi Minyakita ke Papua. Langkah ini diharapkan dapat menyeragamkan harga sesuai dengan ketentuan Pemerintah di seluruh Indonesia. ■ TIF